

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan data hasil riset tentang peran guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2022/20223 yang dilakukan di SMP Nurul Islam kota Probolinggo. Adapun data yang dipaparkan sebagai berikut :

A. Paparan Data

1. Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam

Pada bagian ini dipaparkan data mengenai guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam pada tahun ajaran 2022-2023 data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara pada kepala sekolah, wali kelas, dan guru Pendidikan kewarganegaraan.

Adapun data hasil observasi dan wawancara tentang peran guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII sebagai berikut :

- a. Persiapan Merdeka belajar

Data hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP menurut Islam kota Probolinggo pada hari Kamis, 13 Mei 2023 menggambarkan kondisi sebagai berikut :

Sebelum melaksanakan kurikulum merdeka guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk memahami merdeka belajar terlebih

dahulu sebagai guru penggerak ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam perubahan kurikulum yakni CP (capaian pembelajaran), TP (tujuan pembelajaran) , dan ATP (alur tujuan pembelajaran). Faktor utama yang harus dipersiapkan yaitu :

1. Peserta didik
 2. Menyusun perencanaan program kurikulum merdeka
 3. Meningkatkan pengetahuan atau kompetensi tenaga pendidik
- (O, FP1)

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara pada guru Pendidikan kewarganegaraan yaitu Bapak Hamdan Abdullah. Beliau mengungkapkan bahwa :

Yang perlu disiapkan banyak sekali utamanya terhadap tenaga pendidik dan peserta didik terlebih dahulu agar bisa tercipta interaksi secara penuh untuk menciptakan koordinasi sehingga penerapan kurikulum merdeka bisa terlaksana secara baik. Maka dari itu, saya harus banyak memperbaiki apa yang kurang dan apa saja yang perlu disiapkan secara matang agar memenuhi capaian pembelajaran dalam merdeka belajar.

(W,GPKN, FP1)

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara pada kepala sekolah SMP Nurul Islam yaitu bapak Ahmad Soleh S.pd. beliau mengungkapkan bahwa :

Kita melaksanakan bimtek bimbingan teknologi terlebih dahulu terkait KM implementasi kurikulum Merdeka sebelum diterapkan secara

langsung kita menyiapkan tenaga pendidik dan peserta didik terlebih dahulu artinya sebelum masuk di kurikulum Merdeka kami menggunakan kurikulum 2013 dan pada tahun ajaran baru 2022/2023 sudah menerapkan Mandiri belajar di kelas VII semester 1 sampai sekarang. (W, KS, FP1)

Hal serupa juga disampaikan oleh wali kelas 7 SMP Nurul Islam yaitu Lailatul Azizah. Beliau mengungkapkan bahwa :

Sebelum menerapkan kurikulum merdeka para tenaga Didik harus memahami pedoman implementasi kurikulum Merdeka sebelum terjun langsung ke lapangan agar penyampaian ke peserta didik tidak terlalu sulit dan peserta didik mudah memahami mengenai merdeka belajar. (W, WL, FP1)

Hasil observasi dan wawancara kepada guru Pendidikan kewarganegaraan, kepala sekolah, serta wali kelas VII tentang persiapan pelaksanaan merdeka belajar yang harus disiapkan yaitu tenaga pendidik dan peserta didik agar pada kurikulum merdeka memenuhi capaian yang telah ditentukan oleh kurikulum.

b. Pelaksanaan Merdeka belajar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SMP Nurul Islam kota Probolinggo pada hari Kamis, 11 Mei 2023 yaitu Bapak Ahmat Soleh S.pd. beliau mengemukakan bahwa :

Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka guru Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam kurikulum baru ini,

karena adanya kurikulum merdeka ini profil pelajar Pancasila terbentuk walaupun guru Pendidikan kewarganegaraan harus lebih banyak bekerja dalam pemenuhan program baru yang ada pada program Merdeka belajar. (W, KS, FP1).

Hal serupa juga disampaikan oleh wali kelas VII SMP Nurul Islam yaitu ibu Lailatul Azizah. Beliau mengungkapkan bahwa :

Guru Pendidikan kewarganegaraan sebagai moderator dalam menerapkan kurikulum Merdeka, maka dari itu beliau bertanggung jawab dalam pelaksanaan Merdeka belajar di kelas VII. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini sangat membantu dan banyak perubahan dalam pembelajaran apalagi pada penguatan karakter peserta didik atau P5. (W, WL FP1)

Hal serupa juga disampaikan selaku guru Pendidikan kewarganegaraan yakni Bapak Hamdan Amrullah. Beliau menyampaikan bahwa :

Saya selaku guru Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam Merdeka belajar, saya harus lebih banyak memahami karakteristik peserta didik terutama pada kelas VII agar mereka bisa terdidik secara baik. Oleh sebab itu kita mengikuti profil Pancasila (P5) yang sudah ditetapkan oleh kurikulum merdeka pada program ini ada yang sudah terlaksana seperti demokrasi, nalar kritis, dan kebhinekaan global yang sudah kita laksanakan. (W, GPKN, FP1)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Nurul Islam pada hari Senin, 15 Mei 2023 menggambarkan kondisi sebagai berikut :

Pelaksanaan profil pelajar Pancasila (P5) sudah terlaksana dengan baik tidak hanya pada kelas VII yang ikut melaksanakan program tersebut, akan tetapi seluruh peserta didik baik kelas VII dan kelas IX mengikuti kegiatan profil pelajar pancasila yang diprogramkan guru Pendidikan kewarganegaraan. Seperti kegiatan shalat dhuha, shalat dzuhur, upacara, gotong royong dan demokrasi Pancasila dll.

Hasil wawancara serta observasi kepala sekolah, guru Pendidikan kewarganegaraan dan wali kelas VII dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka guru Pendidikan kewarganegaraan lebih memilih peran penting dalam Merdeka belajar yang diterapkan pada kelas VII SMP Nurul Islam yaitu proses penguatan profil pelajar Pancasila memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan guru Pendidikan kewarganegaraan karena pengembangan karakter atau P5 tercantum pada sistem pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

c. Tugas Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Merdeka Belajar

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari Senin 15 Mei 2023 menggambarkan kondisi sebagai berikut :

Guru Pendidikan kewarganegaraan sudah menjalankan tugasnya dengan baik terutama pada pengembangan karakter peserta didik yang menjadi

fokus utama dalam kurikulum merdeka. Mereka diajarkan bagaimana tutur bahasa secara baik perilaku secara sopan dan adab ke yang lebih tua, kunci utama pada sikap dan perilaku pada peserta didik berbentuk dari didikan guru Pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan maka guru Pendidikan kewarganegaraan contoh paling utama dalam pengembangan karakter dalam lingkungan sekolah. Karena berada di lingkungan pondok pesantren, mereka sudah diajarkan bagaimana bertata krama, berperilaku, beradab. Guru pendidikan kewarganegaraan di SMP bertugas memperbaiki dan membenahi apa yang kurang pada peserta didik, hal ini karena SMP Nurul Islam berbasis pesantren sehingga penanaman karakter sudah diajarkan (O, FP1).

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan kewarganegaraan yaitu bapak Hamdan Amrullah. Beliau mengungkapkan bahwa :

Guru itu digugu dan ditiru. Maka dari itu, saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan harus memberikan cerminan yang baik terhadap peserta didik. Apalagi di kelas VII ini saya harus telaten mendidik anak-anak karena mereka baru saja memasuki fase D yang mana masih terngiang-ngiang sejak sekolah dasar dan mereka masih harus tahap penyesuaian pada tahap SMP. Saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan sangat berkontribusi dalam pengembangan karakter baik pada moral, etika, sopan santun dan adab sehingga anak-anak bisa

terdidik. Di sekolah yang berbasis pondok pesantren ini pembudayaan serta penanaman pembelajaran karakter atau pancasila tertanam bagus sehingga untuk pengarahannya terhadap peserta didik masih bisa dibilang kondusif. Karena dengan adanya dua lembaga yaitu Pesantren dan SMP yang sama-sama memberikan pemahaman/mengarah untuk bisa mendidik siswa/santri sekaligus. (W, GPKN, FP1)

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Nurul Islam yaitu Bapak Ahmat Soleh S.pd mengungkapkan bahwa :

Alhamdulillah, guru Pendidikan kewarganegaraan tugasnya sudah terlaksana dalam kurikulum merdeka beliau selain jadi guru Pendidikan kewarganegaraan juga wakil kepala kurikulum sehingga sangat berkesinambungan dengan kurikulum terbaru ini karena yang sangat kita terapkan di sini adalah pendidikan karakter atau P5. (W, KS, FP1).

Hal serupa juga disampaikan oleh wali kelas VII SMP Nurul Islam yaitu Lailatul Azizah. Beliau mengungkapkan bahwa :

Guru Pendidikan kewarganegaraan sudah menjalankan tugasnya secara baik sebagai guru penggerak dalam kurikulum Merdeka beliau sangat memahami karakteristik pada siswa kelas VII sehingga siswa menjadi terdidik yang memiliki moral etika dan sopan santun. (W, WL, F;P1).

Hasil wawancara serta observasi kepala sekolah, guru Pendidikan kewarganegaraan dan wali kelas VII tentang tugas guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah pengembangan karakter yang merupakan program utama pada

implementasi kurikulum merdeka agar peserta didik lebih memiliki sikap moral, tata krama, sopan santun dan aturan kepada sesama.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahmat Soleh S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi yakni :

1) Praktek IKM

Pelaksanaan mandiri belajar atau merdeka belajar di kelas VII masih belum 100% terlaksana dengan baik, peserta didik masih sedikit kesulitan dalam beradaptasi pada pembelajaran kurikulum merdeka. Asesmen pembelajaran dan perangkat ajar yang digunakan oleh tenaga pendidik juga memiliki keterbatasan, terutama pada digital informasi dan komunikasi untuk mengakses pembelajaran secara digital agar memenuhi apa yang peserta didik ingin dalam KBM sehingga implementasi kurikulum merdeka tidak sepenuhnya terlaksana.

2) Pengetahuan kurikulum merdeka

Keterbatasan pengetahuan menjadi faktor utama dalam penerapan kurikulum merdeka, tidak hanya peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, tetapi tenaga pendidik juga

menjadi faktor penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka. Tenaga pendidik mengalami sedikit kesulitan dalam memanfaatkan platform merdeka belajar yang sudah disediakan pada website kurikulum merdeka yang diakses oleh tenaga pendidik. Tidak semua tenaga pendidik yang ada di sekolah ini bisa mengakses website kurikulum merdeka di karena ada beberapa yang belum terverifikasi.

3) Tidak Sesuai Perencanaan

Sekolah sudah menyusun program yang ditetapkan oleh kurikulum merdeka yaitu program proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) untuk diterapkan ke peserta didik, akan tetapi tidak semua terlaksana. Sama hal-nya dengan menggunakan modul ajar atau yang kita kenal pada kurikulum 2013 yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tidak sesuai pada proses kegiatan belajar mengajar. Banyak dari peserta didik yang belum mengetahui apa itu merdeka belajar sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka. (W, KS, FP2)

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan ibu Lailatul Azizah selaku wali kelas VII SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa :

1) Kemampuan untuk memahami kurikulum merdeka

Ada sejumlah tenaga pendidik yang masih belum memahami kurikulum merdeka yang diterapkan oleh sekolah, karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak terdaftar di platform merdeka belajar yakni dalam bidang keagamaan. Sehingga untuk memahaminya cukup kesulitan walaupun kesulitan dalam memahami merdeka belajar kami berkoordinasi dengan guru pendidikan kewarganegaraan untuk IKM (Implementasi kurikulum merdeka).

2) Media Belajar

Keterbatasan media belajar menjadi penghambat di kelas VII dalam merdeka belajar seperti buku dan teknologi. Untuk buku yang sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka belum sepenuhnya ada, hanya ada beberapa seperti buku paket Bahasa Indonesia (literasi) dan Matematika (numerasi), untuk buku yang lain masih menggunakan LKS. Sedangkan teknologi kami menggunakan seadanya yang disediakan dari sekolah. Karena sekolah berbasis pesantren sehingga peserta didik tidak diperbolehkan untuk membawa barang elektronik.

3) Modul ajar

Modul ajar hanya bisa akses oleh guru yang mempunyai akun platform merdeka belajar dan ini hanya dimiliki guru pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika, untuk dewan guru yang lain menggunakan modul ajar yang mereka buat sendiri, sehingga ini menjadi tidak kesesuaian dalam merdeka belajar. Mereka yang tidak memahami modul ajar masih menggunakan RPP

(Rencana Pelaksana Pembelajaran) agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan semestinya. (W, WK, FP2)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru pendidikan kewarganegaraan SMP Nurul Islam Kota Probolinggo yaitu Bapak Hamdan Amrullah. Beliau mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu :

1) Tenaga pendidik dan peserta didik

Pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki tenaga pendidik dan peserta didik masih minim perihal kurikulum merdeka, pemahaman yang ada pada SMP Nurul Islam sekitar 70% penerapan dan untuk pelaksanaan di pembelajaran 50%. Tenaga pendidik dituntut untuk memahami modul ajar yang sudah tertera pada platform merdeka belajar yang cukup sulit untuk diterapkan pada peserta didik karena tidak sesuai yang terjadi pada lapangan, maka dari itu peserta didik harus diberikan arahan terlebih dahulu proses pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan.

2) Referensi atau buku

Keterbatasan buku /referensi dalam pelaksanaan merdeka belajar menjadi faktor penghambat di SMP Nurul Islam dimana buku-buku tersebut harus sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka dan ini menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran, dimana mereka harus memiliki inisiatif lebih untuk memfasilitasi pembelajaran agar peserta didik bisa terus aktif selama kegiatan belajar mengajar. Untuk dewan guru yang memiliki keterbatasan dalam buku atau

referensi pembelajaran mereka menggunakan LKS sebagai acuan pembelajaran agar terus terlaksana.

3) Perangkat ajar

Keterbatasan perangkat ajar menjadi faktor penghambat pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Nurul Islam, alat, bahan dan media atau pedoman yang dimiliki sangat terbatas. Sehingga peserta didik yang sudah memahami teori tidak bisa untuk mengimplementasikan secara langsung apa yang sudah mereka pahami

4) Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan menjadi faktor penghambat di lembaga SMP Nurul Islam sehingga sekolah mengalami kendala pada prosedur pelaksanaan kurikulum merdeka. Di SMP Nurul Islam masih minim pengetahuan tentang kurikulum merdeka jadi sosialisasi yang diadakan oleh dinas pendidikan sangat diharapkan oleh para dewan guru agar bisa menambah pengetahuan.
(W, GPKN, FP2)

Berdasarkan data yang dihimpun hambatan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII di SMP Nurul Islam yakni : praktek implementasi kurikulum merdeka belum 100 % terlaksana dengan baik, kemampuan dan pengetahuan peserta didik serta tenaga pendidik yang masih terbatas, tidak sesuai perencanaan yang sudah diprogramkan oleh sekolah, keterbatasan media pelajar/perangkat ajar, modul ajar, referensi/buku, dan sosialisasi.

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahmat Soleh S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi yakni :

1) Sosialisasi

Sosialisasi diadakan setiap persemester yang dilaksanakan langsung di SMP Nurul Islam. Sosialisasi diikuti oleh tenaga pendidik untuk melakukan Bimtek (Bimbingan teknologi) yang diawasi langsung oleh pengawas Pembina dari dinas pendidikan untuk meningkatkan kemampuan/skill agar mendapatkan bekal pendidikan terkait digitalisasi pendidikan seperti platform merdeka belajar.

2) Buku

Buku paket yang ada di sekolah cukup memenuhi dalam kegiatan numerasi dan literasi. Buku paket terbaru merupakan terobosan dari kurikulum merdeka agar peserta didik lebih mudah untuk melakukan pembelajaran.

3) Tenaga pendidik

Tenaga pendidik menjadi faktor utama dalam penerapan merdeka belajar di kelas VII, dimana semua mata pelajaran sudah berubah kepada kurikulum merdeka. Walaupun ada beberapa mata pelajaran yang sifatnya diluar jalur dari kurikulum merdeka seperti Bahasa

Arab, MTQ dan PAI, akan tetapi tenaga pendidik mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah sehingga semuanya mendukung agar IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) bisa berjalan dengan baik.
(W, KS, FP2)

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan ibu Lailatul Azizah selaku wali kelas VII SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa :

1. Tenaga pendidik

Tenaga pendidik mendukung penuh terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan sesuai apa yang diinginkan oleh peserta didik yakni merdeka dalam belajar.

2. Platform merdeka belajar

Pada platform merdeka belajar merupakan pencapaian pembelajaran sudah tercantum atau sudah menjadi pedoman untuk semua yang memiliki akun di platform merdeka belajar. Platform merdeka merupakan acuan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti merdeka belajar/belajar mandiri yang disesuaikan dengan perangkat ajar yang sudah ditentukan langsung oleh kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan).

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan pengawas Pembina dari dinas pendidikan dengan memberikan pemahaman platform merdeka belajar, pemahaman asesmen pembelajaran dan dan panduan-panduan

yang harus diterapkan pada IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). (W, WK, FP2).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru pendidikan kewarganegaraan SMP Nurul Islam Kota Probolinggo yaitu Bapak Hamdan Amrullah. Beliau mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu :

1) Tenaga pendidik dan Peserta didik

Faktor utama keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah tenaga pendidik yang sudah menjadi subjek dalam merdeka belajar sesuai keputusan Kemendikbud (Kementerian pendidikan dan kebudayaan) dimana merdeka dalam mendidik dan peserta didik merdeka dalam berkreasi. Maka yang difokuskan dalam kurikulum merdeka adalah peserta didik untuk mengolah kemampuan, dalam artian bakat apa yang mereka punya dan pembelajaran apa yang mereka sukai sekolah akan memberikan wadah yang sesuai dengan merdeka belajar seperti berkarya, berinovasi dan berkeaktivitas.

2) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan pengawas Pembina setiap assessment/persemester yang memberikan penjas-penjelasan mengenai modul ajar serta perangkat ajar. Sosialisasi diadakan agar bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, yang diharapkan mampu membawa perubahan pada SMP Nurul Islam. Dan dengan diadakannya sosialisasi ini mampu menambah

pengetahuan serta kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik dalam berinovasi, berkarya dan berkreaitivitas dalam kegiatan belajar mengajar.

3) Platform merdeka belajar

Platform merdeka belajar merupakan kunci utama dalam implementasi kurikulum merdeka. Fitur ini sebagai sarana untuk mewujudkan pelajar pancasila. Melalui platform merdeka belajar yang dilengkapi dengan fitur mengajar banyak hal yang ditawarkan pada situs ini yakni perangkat ajar yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga didik dengan referensi 1000 lebih. Platform merdeka belajar juga menyediakan fitur asesmen peserta didik untuk melaksanakan kegiatan numerasi dan literasi sebagai edukasi belajar, mengajar, dan berkarya. (W, GPKN, FP3).

Berdasarkan data yang dihimpun faktor pendukung yang ada dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII di SMP Nurul Islam yakni : kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan setiap persemester, tenaga pendidik dan peserta didik, buku paket untuk kegiatan numerasi dan literasi, dan platform merdeka belajar sebagai akses pembelajaran pada kurikulum merdeka.

3. Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahmat Soleh S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi yakni :

- 1) Melakukan pembenahan-pembenahan melalui rapat kerja, evaluasi, dan mengadakan sosialisasi dengan pengawas Pembina apabila ada hal yang tidak dimengerti untuk memperbaiki implementasi kurikulum merdeka agar sesuai dengan yang diinginkan oleh dinas pendidikan.
- 2) Memberikan informasi atau arahan terlebih dahulu kepada peserta didik agar nantinya apa yang kita rencanakan di kurikulum merdeka bisa terlaksana secara baik agar sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lapangan.
- 3) Tenaga pendidik harus benar-benar dituntut dan memahami terlebih dahulu merdeka belajar, agar sebelum melaksanakan kurikulum merdeka bisa mengatasi sedikit demi sedikit hambatan yang ada pada SMP Nurul Islam. (W, KS, FP3).

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan ibu Lailatul Azizah selaku wali kelas VII SMP Nurul Islam Kota Probolinggo. Beliau mengungkapkan bahwa :

- 1) Mengikuti kegiatan sosialisasi atau webinar baik secara online maupun offline agar menambah wawasan dan pengetahuan terkait panduan merdeka belajar serta assessment pembelajaran pada kurikulum merdeka.

- 2) Para dewan guru dituntut untuk benar-benar memahami kurikulum merdeka agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu tenaga pendidik harus memiliki kompetensi/skill yang memadai untuk menerapkan kurikulum merdeka. (W,WL, FP3)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru pendidikan kewarganegaraan SMP Nurul Islam Kota Probolinggo yaitu Bapak Hamdan Amrullah. Beliau mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu :

- 1) Mengunduh bahan ajar/modul ajar dari aplikasi atau halaman yang sudah disiapkan oleh kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan) yaitu platform merdeka belajar yang mana mulai dari pelatihan mandiri, assessment pembelajaran, perangkat ajar, video ajar, dan berbagai referensi yang bisa dijadikan contoh pembelajaran Di kelas VII SMP Nurul Islam.
- 2) Mengikuti kegiatan sosialisasi, karena yang kita butuhkan adalah sinkronisasi dan integrasi untuk memenuhi kriteria kurikulum merdeka. Sosialisasi ini difokuskan dalam merdeka belajar agar tenaga pendidik lebih cekatan dalam memahami kurikulum merdeka
- 3) Mengikuti peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Keputusan No. 56/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran yang menjelaskan keunikan kurikulum di SMP/MTS. Panggunnya terdiri dari satu tahap yaitu kelas VII, VII dan IX. (W, GPKN, FP3)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan data yang didapat dalam upaya mengatasi hambatan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pembenahan melalui rapat kerja
- b) Memberikan pemahaman dan arahan ke peserta didik
- c) Mengikuti kegiatan sosialisasi
- d) Tenaga pendidik dituntut memahami merdeka belajar

Keterangan :

O : Observasi

DO : Dokumentasi Observasi

D : Dokumentasi

FP1 : Fokus Penelitian 1

W : Wawancara

FP2 : Fokus Penelitian 2

KS : Kepala Sekolah

FP3 : Fokus Penelitian 3

WL : Wali Kelas

DW : Dokumentasi Wawancara

GPKN : Guru Pendidikan Kewarganegaraan

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, dan guru PKn, serta hasil dokumentasi peran guru PKn (PCN) dalam implementasi kurikulum swadaya di SMP Kelas VII tahun pelajaran 2022/2023. Berikut hasil penelitiannya:

1. Peran guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam
 - a) Persiapan Merdeka

Sebelum menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII sekolah mempersiapkan tenaga pendidik dan peserta didik untuk memahami merdeka belajar, mulai dari Bimtek (Bimbingan Teknologi), menyusun perencanaan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi/skill tenaga pendidik agar bisa memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh kurikulum sehingga untuk terjun kelapangan tidak banyak mengalami kesulitan .

b) Pelaksanaan merdeka belajar

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka di kelas VII, guru Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek penguatan profil siswa Pancasila (P5) yang ditetapkan oleh kurikulumnya Merdeka. Dalam program proyek (P5) untuk meningkatkan visibilitas siswa Pancasila, seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan program yang melibatkan seluruh sekolah seperti Sholat Dhuha berjamaah, Sholat Dzuhur, Ritual, Gotong Royong, Demokrasi Pancasila, kegiatan ini memberikan dampak positif dan dapat mengubah sekolah menjadi lebih baik di masa mendatang. Guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan proyek ini karena mereka sangat terlibat dalam proyek peningkatan profil siswa Pancasila (P5). Terdaftar dengan Sistem Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

c) Tugas guru pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai guru penggerak dalam kurikulum merdeka Guru pendidikan kewarganegaraan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yang menjadi fokus utama pada kelas VII adalah pengembangan karakter peserta didik. Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan kareketristik peserta didik supaya mereka bisa terdidik dengan baik. Karena sekolah yang berada di lingkungan pondok atau sekolah berbasis pesantren maka yang sangat ditekankan adalah pengembangan karakter baik moral, etika, adab, sopan santun, tata krama, dan akhlak yang baik. Tingkat keberhasilan guru pendidikan kewarganegaraan dilihat dari perubahan tingkah laku yang semakin positif.

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam
 - a. Faktor penghambat
 - 1) Praktek implementasi kurikulum merdeka pelaksanaan kurikulum merdeka belum 100 % terlaksana dengan baik.
 - 2) Keterbatasan pengetahuan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang dialami oleh tenaga pendidik dan peserta didik
 - 3) Tenaga pendidik dan peserta didik mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu 70% penerapan dan 50% pelaksanaan
 - 4) Program yang disusun oleh sekolah tidak sesuai untuk diterapkan ke peserta didik secara langsung di lapangan
 - 5) Keterbatasan Perangkat ajar atau media ajar seperti alat, bahan, serta pedoman

- 6) Keterbatasan buku/referensi yang sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka.
 - 7) Modul ajar hanya bisa akses oleh guru yang mempunyai akun platform merdeka belajar.
 - 8) Kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan mengalami kendala pada prosedur pelaksanaan kurikulum merdeka pengetahuan sendiri.
- b. Faktor pendukung
- 1) Sosialisasi dilakukan dengan pengawas Pembina dari dinas pendidikan dengan memberikan pemahaman platform merdeka belajar.
 - 2) Keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah tenaga pendidik dan peserta didik.
 - 3) Melalui platform merdeka belajar keberhasilan pencapaian peserta didik mengikuti pedoman.
 - 4) Buku paket terbaru
2. Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam.
- a. Tenaga pendidik harus benar-benar dituntut dan memahami terlebih dahulu merdeka belajar, agar sebelum melaksanakan kurikulum merdeka bisa mengatasi sedikit demi sedikit hambatan yang ada.
 - b. Melakukan pembenahan-pembenahan melalui rapat kerja, evaluasi, dan mengadakan sosialisasi dengan pengawas Pembina apabila ada hal yang tidak dimengerti mengenai implementasi kurikulum merdeka.

- c. Memanfaatkan platform merdeka belajar dengan mengunduh modul ajar atau perangkat ajar yang tertera pada halaman platform seperti asesmen, pelatihan mandiri serta referensi.
- d. Mematuhi peraturan hukum dengan menggunakan nomor keputusan pemerintah 03/05/2022 Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Mandiri Dalam Rangka Pembelajaran dan Rekreasi, Mendeskripsikan Level 1: VII, VIII, dan IX

Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam Menerapkan Kurikulum merdeka di Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2022/2023

Peran guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam

- a. Persiapan Merdeka
Mempersiapkan tenaga pendidik dan peserta didik untuk memahami merdeka belajar.
- b. Pelaksanaan merdeka belajar
Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) yang telah ditetapkan oleh kurikulum merdeka.
- c. Tugas guru pendidikan Kewarganegaraan
Guru pendidikan kewarganegaraan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yang menjadi fokus utama adalah pengembangan karakter

Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam.

- a. Tenaga pendidik harus benar-benar dituntut dan memahami kurikulum merdeka
- b. Melakukan pembenahan-pembenahan melalui rapat kerja, evaluasi, dan mengadakan sosialisasi
- c. Memanfaatkan platform merdeka belajar dengan mengunduh modul ajar atau perangkat ajar
- d. Mengikuti peraturan UU dengan Surat keputusan nomor : 5/M/2022

Gambar B. Bagan temuan penelitian peran guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII Sekolah Menengah pertama tahun ajaran 2022/2023

C. Pembahasan

Bagian ini menjelaskan temuan penelitian yang terkait dengan fokus penelitian kami. Data yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Peran guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam

SMP Nurul Islam sebelum melaksanakan kurikulum merdeka, kepala sekolah mempersiapkan guru dan siswa kelas VII untuk memahami sistem kurikulum merdeka, mulai dari kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknologi), menyusun perencanaan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi/skill guru. Supaya bisa memenuhi pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh kurikulum merdeka sehingga untuk terjun langsung kelapangan tidak banyak mengalami kesulitan .

Arnes (2023) menunjukkan bahwasannya guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sangat mendorong implementasi kurikulum merdeka Program merdeka belajar yang disusun dengan baik tidak akan berjalan optimal jika tidak dilaksanakan secara konsisten di sekolah. Melaksanakan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam, guru pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Untuk program yang sedang dijalankan oleh SMP Nurul Islam yaitu profil pelajar pancasila (P5), kegiatan ini dilaksanakan setiap hari.

Rusdiawan, R (2020) Guru Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan karakter siswanya mengikuti Proyek Peningkatan Profil

pelajar Pancasila Artinya mandiri, kreatif, inovatif, setia, kolaboratif, berpikir kritis, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Program proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5), guru pendidikan kewarganegaraan sudah mengimplementasikan program tersebut yang diikuti oleh seluruh Siswa SMP Nurul Islam seperti gotong royong, berakhlak mulia, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, kreatif, mandiri, dan kebhinekaan tunggal. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif yang membawa perubahan pada SMP Nurul Islam kearah yang lebih baik lagi kedepannya. Karena guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) yang tercantum pada sistem pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Oleh karena itu, teori ini konsisten dengan sumber yang melaporkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan peran penting dalam mengimplementasikan *soft skill* dan pengembangan karakter melalui proyek pelajar pancasila untuk meningkatkan visibilitas siswa dalam Pancasila. Berfokus pada profil Pancasila yang dilaksana setiap hari oleh SMP Nurul Islam

Guru pendidikan kewarganegaraan adalah guru penggerak dalam kurikulum merdeka yang menjalan tugasnya dengan baik. Pada penerapan kurikulum merdeka fokus utamanya adalah kelas VII dalam mengembangkan karakter siswa sehingga guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan kareketristik siswa supaya mereka bisa terdidik dengan baik.

SMP Nurul Islam berada di lingkungan pondok pesantren, yang sangat ditekankan adalah pendidikan karakter seperti moral moral, etika, adab, sopan santun, tata krama, dan akhlak yang baik. Maka, Tingkat keberhasilan guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) adalah diukur dari perubahan tingkah laku siswa yang semakin terdidik.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam

Ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam yakni :

a. Faktor penghambat

1) Praktek implementasi kurikulum merdeka

Pelaksanaan kurikulum merdeka belum 100 % terlaksana dengan baik, asesmen pembelajaran dan perangkat ajar yang digunakan oleh pendidik masih terbatas, khususnya pengetahuan teknologi dan komunikasi, untuk merancang pembelajaran secara digital.

2) Pemahaman kurikulum merdeka

Keterbatasan pengetahuan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tidak hanya peserta didik akan tetapi tenaga pendidik memiliki keterbatasan dalam pengetahuan seperti guru keagamaan, sehingga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.

3) Tenaga pendidik dan peserta didik

Tenaga pendidik dan peserta didik masih kurang memahami implementasi kurikulum merdeka, sehingga 70% penerapan dan 50% hanya pelaksanaan di dalam proses pembelajaran karena tidak sesuai yang terjadi di lapangan.

4) Tidak sesuai perencanaan

Sekolah sudah menyusun program yang telah ditetapkan oleh kurikulum merdeka yaitu program projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) untuk diterapkan ke peserta didik, akan tetapi tidak semuanya bisa terlaksana.

5) Perangkat ajar atau media ajar

Keterbatasan media seperti alat, bahan, serta pedoman membuat peserta didik kesulitan untuk mengimplementasikan teori yang sesuai dengan buku. Untuk media sendiri masih mengalami kesulitan di buku paket dan elektronik seperti ponsel karena siswa berada di lingkungan pondok pesantren.

6) Referensi atau buku

Keterbatasan buku/referensi yang sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka menimbulkan kesulitan dalam pembelajaran, tenaga pendidik harus berinisiatif untuk memfasilitasi pembelajaran agar peserta didik dapat tetap aktif selama pembelajaran berlangsung.

7) Modul ajar

Modul ajar hanya bisa akses oleh guru yang mempunyai akun platform merdeka belajar dan ini hanya dimiliki oleh guru pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika, untuk tenaga

pendidik yang lain menggunakan modul ajar yang mereka buat sendiri, sehingga ini menjadi tidak kesesuaian dalam merdeka belajar.

8) Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan mengalami kendala pada prosedur pelaksanaan kurikulum merdeka sehingga untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih jelas mengenai kurikulum merdeka, tenaga pendidik berusaha sebisa mungkin mendapatkan pengetahuan sendiri.

b. Faktor pendukung

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan pengawas Pembina dari dinas pendidikan dengan memberikan pemahaman platform merdeka belajar, pemahaman asesmen pembelajaran dan panduan-panduan yang harus diterapkan pada IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) agar bisa meningkatkan kemampuan kompetensi/skill.

2) Tenaga pendidik dan Peserta didik

Keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah tenaga pendidik yang sudah menjadi subjek dalam merdeka belajar sesuai keputusan Kemendikbud (Kementerian pendidikan dan kebudayaan) dimana merdeka dalam mendidik dan peserta didik merdeka dalam berkreasi.

3) Platform merdeka belajar

Melalui platform merdeka belajar keberhasilan pencapaian peserta didik mengikuti pedoman. Platform merdeka belajar yang dilengkapi dengan fitur mengajar banyak hal yang ditawarkan pada situs ini yakni perangkat ajar yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga didik dengan referensi 1000 lebih dan juga menyediakan fitur assessment untuk peserta didik.

4) Buku

Buku paket terbaru merupakan terobosan dari kurikulum merdeka agar peserta didik lebih mudah untuk melakukan kegiatan numerasi dan literasi.

3. Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam.

- a. Tenaga pendidik harus benar-benar dituntut dan memahami terlebih dahulu merdeka belajar, agar sebelum melaksanakan kurikulum merdeka bisa mengatasi sedikit demi sedikit hambatan yang ada. Guru harus juga perlu memutakhirkan pengetahuan mereka tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka sehingga perencanaan dan pembelajaran menjadi efektif dan efisien.
- b. Melakukan pembenahan-pembenahan melalui rapat kerja, evaluasi, dan mengadakan sosialisasi dengan pengawas pembina apabila ada hal yang tidak dimengerti mengenai implementasi kurikulum merdeka. Dengan diadakannya rapat kerja, evaluasi dan sosialisasi maka keberhasilan dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka adalah kepala sekolah dan guru yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi.

- c. Memanfaatkan platform merdeka belajar dengan mengunduh modul ajar atau perangkat ajar yang tertera pada halaman platform seperti asesmen, pelatihan mandiri serta referensi. Guru juga dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka melalui fitur bahan ajar. Modul pada Platform dapat diunduh langsung atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran
- d. Mengikuti peraturan UU dengan Surat keputusan nomor : 5/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran yang menjelaskan tentang tahap 1 yakni VII, VIII, dan IX. kepala sekolah serta guru mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud (Kementerian pendidikan dan kebudayaan) agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah seperti sanksi kepada sekolah jika tidak mengikuti peraturan kementerian pendidikan dan budaya (Kemendikbud).